

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

- Afriyanto, Renaldy Dkk., “Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf,” *Unizar Law Review* 7, No. 2 (2024): 203–11,
- Afdhali, Dino Rizka, “Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum,” *Collegium Studiosum Journal*, 2023.
- Al Banani, Sabet. “Perlindungan Hukum Bagi pihak Lemah Dalam Proses Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 130–37.
- Arwanto, Bambang. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah.” *Jurnal Yuridika* 31, no. 3 (2016).
- Aulia, Keysha Nashwa dkk., “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24.
- Ayunita, Khelda, dan Amiruddin Lannurung. *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. TOHAR MEDIA, 2022.
- Buonsu, I Gede Dkk., “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 1 (2021): 68–72.
- Dani, Umar. “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity or Duality Of Jurisdiction System: A Study of Hierarchy and Characteristic.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405.
- Dzikirullah ,Muhammad H Noho Dan Muhammad Dzikirullah, “Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia,” *Rechtvinding Online*. September 11 (2020).
- Fadli Falih Dkk., “Kewenangan Ptun Dalam Menguji Sikap Diam Pejabat Pemerintahan,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2023): 180,
- Fitriyani, Kadek Dwi Dkk., “Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus

- Perkara Nomor: 23/G/2015/Ptun. Dps),” *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 2 (2019): 254–58.
- Hakim, Muhammad Helmy, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2016): 105–14.
- Huroiroh, Ernawati Dkk., “Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, No. 2 (2022): 50–76.
- Irvansyah, Andika Risqi. “Kedudukan hukum keputusan fiktif positif sejak pengundangan undang-undang cipta kerja.” *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (2022): 208–26.
- Kamil, Muhammad Akbar, “Peran peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,” “ *Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021): 16.
- Khoir, Akhyar Al, “Subjek Dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Sahabat Isnu Su* 1, No. 2 (2024): 64–68.
- Maswanto, Akhmad Rudi dan Ahmad Khoirul Anam, “Nalar Hukum Prismatic Dalam Konteks Hukum Nasional,” *MAQASHID* 4, no. 2 (2021): 50–64
- Muhlashin, Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1 (2021): 87–100.
- Murti, I Made Gede Wisnu. “Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 959–69.
- Naleng, Seflin Andari Juanisa Dkk., “Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Lex Privatum* 15, No. 3 (2025).
- Noho, Muhammad Dzikirullah H, dan Muhammad Dzikirullah. “Mendudukan Common Law System dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia.” *Rechtvinding Online*. September 11 (2020).
- Novira, Rahmadian, dan IGAP Kartika. “Upaya Atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022).
- Pangestu, Dewa Rizky, dan Sulaksono Sulaksono. “Tinjauan Hukum Inkonsistensi Fiktif Positif Pada Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” *Novum: Jurnal Hukum*, 2026, 518–27.
- Putra, Hendra Catur. “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 130–43.
- Putra, Muhammad Amin, “Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” *J. Huk. Peratun* 3 (2020): 1–18.
- Kamil, Muhammad Akbar, “Peran peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,” “ *Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021): 16.

- Radburch, Gustav, *Statutory Lawlessness and Suprastutory Law*, diterjemahkan Oleh Bonnie Litschewski dan Stanlet L. Paulson (Oxford Journal of Legal Studies, Vol.26, No 1, 2006), hal. 6.
- Ramadhani, Alqoni'atuz Zakiyatur dkk., "Membedah Putusan Ptun Jakarta No. 230/G/Tf/2019/Ptun-Jkt Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- Ridwan, HR,dkk., "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339–58.
- Riza, Dola, "Hakikat Ktun Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang Undang Admnistrasi Pemerintahan," *Soumatara Law Review* 2, No. 2 (2019): 207.
- Riza ,Dola, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 85–102.
- Rodding, Budiamin. "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017): 26–37.
- SA PENU dkk., "Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Tindakan Faktual Pemerintah," *Action Research* 8, no. 12 (2024): 5478–95.
- Santoso, Bagus Teguh, dan NFN Sadjijono. "Keputusan fiktif positif sebagai bentuk reformasi birokrasi berdasarkan prinsip good governance/fictive positive decision as a form of bureaucratic reform based on the good governance principles." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 119–44.
- Siagian, Abdhy Dkk., "Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)," *Jurnal Hukum Peratun* 6, No. 1 (2023): 35–56.
- Siregar, Praise Junta Ws, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum," " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui* 2, No. 2 (2022): 37.
- Spaltani, Bitu Gadsia, "Rekonsepsi Keputusan Fiktif Positif pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2024): 91–101.
- Tahir, Erdin, dan Afriman Oktavianus. "The Implications of the Constitutional Court's Decision on the Prohibition of Extraordinary Legal Remedy by State Administrative Bodies or Officials." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 5, no. 3 (2025).
- Tedi Sudrajat, SH, dan SH Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.
- Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama, Hilman Prayuda, dan Imam Alfurqan. "Perubahan Konsep Fiktif Positif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja.” *Indonesia Berdaya* 5, no. 4 (2024): 1459–66.
- Utama, Kartika Widya. “Quo Vadis Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata USAha Negara Jis. Undang-undang No 51 Tahun 2009 Dan Kompetensi Peradilan Tata USAha Negara Dalam UU. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015): 356–63.
- Utama, Kartika Widya. “Surat keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif.” *Notarius* 8, no. 2 (2015): 141–251.
- Wahyunadi, H Yodi Martono. *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Prenada Media, 2025.
- Wandhani, Komang Trisuci Nirmala, Apriliya Veronica Pasaribu, Aulya Nur’Ariani, dan Putu Ayu Widia Santini. “Analisis Dinamika Hukum Terhadap Keputusan Fiktif Negatif dan Positif Dalam Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 1 (2024): 18–29.
- Yuliani, Erlin Triartha, “Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Permasalahannya,” *University Of Bengkulu Law Journal* 5 (2020): 1–11.

Buku

- Anam, M Khoirul, “Proyek Filsafat Plato,” (*Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran*, 2018).
- Chandra Febrian, *Pengantar Hukum Acara PTUN*, (Meja Ilmiah Publikasi, 2024, hal.15).
- Efendi, Joenadi Dan Ibrahim Johnny, , *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta Kencana, 2016), hal. 57.
- Hadjon, P.M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987),
- Hari, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakart: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal.100).
- Ismoyo, Jarot Digo Dkk., *Teori Negara Hukum Modern* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
- Mahfud Muh. Afif, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yoga Pratama: 2024)
- Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (STPN Press, 2022).
- Redi Ahmad, SH. *Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara*. (Sinar Grafika, 2022).
- Sari, Ini Ketut, *Hukum Tata Negara-Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, (Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2020), hal 30.
- Sari, E., & Iskandar, H, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Lhoksumawe : Bienaeducasi, 2014).

- Syahrizal, Sh, Darda, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Mediapressindo, 2013).
- Taufani, Suteki & Galang, “Metode Penelitian Hukum”, (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 217.
- Wadjo, Hadibah Z Dan Mh Sh, “Sistem Hukum,” (CV. Gita Lentara 2023) hal. 63.
- Wahyunadi, H Yodi Martono Dan Mh Sh, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Prenada Media, 2025).

Artikel

- Arafat, S.H., M.H. “Penafsiran Upaya Administratif Terhadap Keputusan Fiktif Negatif.” Artikel Pimpinan Redaksi. *Mahkamah Agung Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, 4 Desember 2025. https://mail.ptun-samarinda.go.id/berita/artikel-pimpinan-redaksi#_ftn1.
- Bahri Idik Saeful, “Aktifnya Ketentuan Pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak hanya terbatas pada Sengketa Mineral One Data Indonesia”, MARINews 2025. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/aktifnya-ketentuan-pasal-3-uu-peradilan-tata-usaha-negara-0uU#:~:text=Aktifnya%20Ketentuan%20Pasal%203%20UU%20Peradilan%20Tata%20Usaha%20Negara>.
- Utomo Panca Yunior, Artikel “Diskusi Reboan PTUN Bandung: Fiktif Negatif, Aktif Kembali”, MARINews 2025. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/diskusi-reboan-ptun-bandung-fiktif-negatif-aktif-kembali-0u>.
- Wahyunadi, Yodi Martono Dan Mh Sh, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” Diakses dari: https://Ptun-Jakarta.Go.Id/Wp-Content/Uploads/File/Berita/Daftar_Artikel/Kompetensi%20pengadilan%20tata%20usaha%20negara%20dalam%20sistem%20peradilan%20di%20indonesia.Pdf, 2015.
- Wahyudi, Yodi Martono, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Artikel Hukum Online, 2016. Diakses dari <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb494e201fb73001038c79d/kompetensi-absolut-pengadilan-tata-usaha-negara-dalam-konteks-undang-undang-nomor-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-the-absolut-competence-of-administrative-court-based-on-law-number-30-of-2014-concerning-government-administration>.

Skripsi

- Hanafi, Furoaan, Skripsi “Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Pertanahan Aset Badan Usaha Miliki Negara (BUMN)”, (Semarang; UNDIP, 2024), hal. 14).

Tesis

Rokhim, W. A., Wahid Abdur. *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Analisis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Tahun 2015-2017)*. 2018. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11729>.

Wawancara

Hakim Christin Andriani, SH.,M.H Hakim PTUN Semarang, “Wawancara Fiktif Negatif.”. November 18, 2025.